

## **ABSTRAK**

Pemberian fasilitas kredit oleh lembaga keuangan akan mendapatkan suatu permasalahan ketika debitör tidak dapat memenuhi prestasinya dan mulai masuk dalam kategori kol 2 maka kreditor sebagai lembaga keuangan wajib menyediakan dana pencadangan, hingga debitör masuk dalam kategori debitör macet atau kol 5 yang mempengaruhi tingkat likuiditas serta *solvabilitas* bank yang bersangkutan, oleh karena itu bank harus segera mendapatkan solusi untuk memulihkan kondisi tersebut dengan salah satu cara termudah adalah melakukan parate eksekusi terhadap hak kebendaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam lembaga jaminan fidusia dan dapat dilakukan kapanpun tanpa adanya persyaratan untuk menunggu terhadap suatu kondisi tertentu khususnya kondisi kepailitan. Namun hal tersebut berlainan dan bagi lembaga perbankan permasalahan akan semakin besar ketika debitör mendapatkan putusan pernyataan pailit dari pengadilan, dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat adanya lembaga penangguhan eksekusi jaminan utang untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, diperlukan sebuah pemecahan atas problematika hukum tersebut dihubungkan dengan keabsahan pelaksanaan lelang benda jaminan dalam masa tangguh (*stay*) pailit sehingga jaminan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah ini dapat terlindungi.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan, Jaminan Fidusia, Kepailitan.

## ABSTRACT

The provision of credit facilities by financial institutions will get a problem when the debtor is unable to fulfill his performance and starts to fall into the category of “kol 2”, the creditor as a financial institution is obliged to provide a reserve fund, until the debtor enters the category of bad debtors or “kol 5” which affects the level of liquidity and solvency of the bank concerned, therefore the bank must immediately get a solution to recover the condition by one of the easiestways is to do an execution parate of the property rights that it has in accordance with the provisions in the fiduciary guarantee institution and can be done at any time without any conditions to wait for a condition in particular bankruptcy conditions. However, this is different and for banking institutions the problem will be even greater when the debtor gets a decision on bankruptcy statements from the court, in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delays in Debt Payment Obligations, there is an institution suspending debt guarantee execution for a maximum period of 90 (ninety) days from the date the decision of the bankruptcy statement is pronounced. Thus, a solution to the legal problems is needed to be linked to the validity of the auction of collateral in the periodof bankruptcy so that legal guarantees for all parties related to this issue can be protected.

Keyword : Financial institutions, fiduciary guarantee institution, Bankruptcy.